

## ABSTRAK

### **PERAN KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG PADA EKSEKUSI PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)**

Oleh:

**Meiza Amanda Pratama**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menetapkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita. Namun dalam praktik pelaksanaan eksekusi restitusi masih ditemukan kendala di mana hak korban tidak terpenuhi meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam eksekusi pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran tersebut.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan cara studi pustaka dan wawancara kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1.) Peran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam eksekusi restitusi pada perkara ini menunjukkan adanya disfungsi peran di mana Jaksa lebih dominan berperan sebagai penghimbau pasif (*passive informer*). Secara faktual, Jaksa hanya sebatas menyampaikan kewajiban pembayaran kepada terpidana tanpa melakukan penyitaan nyata, hal ini disebabkan karena peran ideal Jaksa sebagai eksekutor wajib terhambat oleh kenyataan konkret di lapangan berupa kondisi ekonomi pelaku yang sangat minim serta ketiadaan regulasi yang memberikan daya paksa terhadap kasus kekerasan seksual anak dibandingkan dengan kasus perdagangan orang. (2.) Faktor-faktor yang menghambat eksekusi meliputi faktor hukum yaitu adanya kekosongan hukum (*legal gap*) terkait ketiadaan aturan sanksi subsider yang tegas dan mekanisme penyitaan sita aset yang kuat. Selain itu terdapat faktor penegak hukum di mana Jaksa menghadapi konflik peran antara tuntutan yuridis dengan pertimbangan hati nurani terhadap kemiskinan terpidana, yang diperburuk oleh

*Meiza Amanda Pratama*

faktor sarana berupa ketiadaan aset material milik terpidana yang layak disita guna memenuhi nilai restitusi.

Disfungsi peran tersebut mengakibatkan restitusi hanya berakhir sebagai status terutang tanpa batas waktu yang mendesak, sehingga tujuan hukum untuk memberikan keadilan restoratif bagi anak korban kekerasan seksual tidak dapat direalisasikan secara nyata.

Saran dari penelitian ini yaitu Lembaga Kejaksaan agar lebih mengoptimalkan sinergi dan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar menguatkan asesmen komprehensif terhadap kondisi ekonomi pelaku dalam penghitungan restitusi. Pemerintah diharapkan meningkatkan peran proaktif melalui penyederhanaan prosedur penyitaan aset, serta diharapkan kepada DPR agar memasukkan mekanisme penyitaan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif pengganti restitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

**Kata Kunci: Peran Kejaksaan, Restitusi, Anak Korban Kekerasan Seksual.**

## **ABSTRACT**

### ***THE ROLE OF THE BANDAR LAMPUNG DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE IN THE EXECUTION OF RESTITUTION FOR CHILDREN VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE CRIMES***

***(Study of Decision Number: 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)***

**By:**

**Meiza Amanda Pratama**

*According to Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), victims are entitled to restitution as a form of compensation for material and immaterial losses. However, in the execution of restitution, it is still found that the rights of victims are not fulfilled, even though the decision has become final and binding, as occurred in Decision Number 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. This study aims to analyze the role of the Kejaksaan Negeri Bandar Lampung in executing the restitution of victims of sexual violence and to examine the factors that influence the effectiveness of this role.*

*The study employed a juridical normative and juridical empirical approach through a literature review and interviews with prosecutors at the Bandar Lampung District Attorney's Office and criminal law professors at the University of Lampung's Faculty of Law. Data analysis was then conducted using a descriptive qualitative approach.*

*The results of the study show that: (1.) The role of the Bandar Lampung District Attorney's Office in the execution of restitution in this case shows a dysfunctional role in which the prosecutor plays a more dominant role as a passive informer. In fact, prosecutors only convey the obligation to pay to the convicted person without taking any real coercive measures. This is because the ideal role of prosecutors as mandatory executors is hampered by the concrete reality in the field, namely the very poor economic conditions of the perpetrators and the absence of regulations that provide coercive power in cases of child sexual violence compared to cases of human trafficking. (2.) Factors that hinder enforcement include legal factors, namely the existence of a legal gap related to the absence of clear subsidiary sanctions and a strong mechanism for asset seizure. In addition, there are law enforcement factors where prosecutors face a conflict of roles between legal*

**Meiza Amanda Pratama**

*demands and moral considerations regarding the poverty of the convicted person, which is exacerbated by the lack of material assets belonging to the convicted person that are suitable for seizure to meet the value of restitution.*

*This dysfunctional role results in restitution ending up as an indefinite debt, without any urgent deadline, thereby preventing the legal objective of providing restorative justice for child victims of sexual violence from being realized in practice.*

*The recommendation from this study is that the Attorney General's Office should optimize its synergy and coordination with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in order to strengthen comprehensive assessments of the economic conditions of perpetrators in calculating restitution. The government is expected to increase its proactive role by simplifying asset seizure procedures, and the House of Representatives is expected to include seizure mechanisms and community service as alternatives to restitution in the Criminal Procedure Code (KUHAP).*

**Keywords: Role of the Prosecutor's Office, Restitution, Child Victim of Sexual Violence.**